

**NASIONALISME MASYARAKAT PERBATASAN DI KALIMANTAN  
BARAT INDONESIA****Elyta***Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura, Pontianak*

Email : elyta.elyta79@gmail.com

**Abi Sofyan***Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura, Pontianak***Ishaq Rahman***Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makasar***Ully Nuzulian***Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura, Pontianak***Abstrak**

Nasionalisme masyarakat perbatasan disinyalir menjadi permasalahan akibat aktivitas mereka yang bergantung pada negara Malaysia, penelitian ini menerapkan metode kualitatif deskriptif dalam menganalisa kondisi nasionalisme di perbatasan Kalimantan Barat yang difokuskan pada wilayah perbatasan Sajingan Besar. Hasil penelitian pada wilayah Sajingan Besar Sambas menunjukkan dua hasil sudut pandang kondisi nasionalisme yaitu (1). Identitas Masyarakat perbatasan Sajingan Besar, berdasarkan kesadaran, identitas, dan ideologi nasional masyarakat perbatasan dimana masyarakat perbatasan bergantung pada Malaysia dan membutuhkan akses keluar masuk negara serta perilaku dominannya pembelian produk Malaysia; (2). Peran pemerintah dalam meningkatkan Kesadaran nasional, ketergantungan masyarakat perbatasan diakibatkan lemahnya pembangunan, sementara pembangunan negara Malaysia sudah dikategorikan maju.

**Kata Kunci:** Nasionalisme, identitas, perbatasan.**Abstract**

*The nationalism of the border community is alleged to be a problem due to the activities of those who depend on Malaysia This study applies descriptive qualitative methods in analyzing the conditions of nationalism on the West Kalimantan border which is focused on the Sajingan Besar border area. The results of the study on the Sajingan Besar Sambas region showed two results from the point of view of nationalism conditions which refer to nationalism indicators, namely: (1). National identity, (2). The role of government in increasing national awareness; (Greenfeld, 1992: 3). (1). The identity of the Sajingan Besar border community, based on the awareness, identity and ideology of border communities while the border community depends on Malaysia and requires access to and out of the country and influences the dominant purchase of Malaysian products tends; (2). The role of the government in increasing national awareness, the dependence of border communities is due to weak development while the Malaysian border is already fairly developed.*

**Keywords:** Nationalism, identity, borders.

### **Pendahuluan**

Namun Secara sempit, nasionalisme juga diartikan sebagai prinsip politik yakni adanya kesamaan suatu unit politik dan nasional (Gellner 1983,1). Nasionalisme wujud dari suatu instrument yang dimiliki negara untuk mendapatkan preferensi negara, misalnya meningkatkan pengaruhnya dalam hubungan internasional (Zhao 2000, 21-23). Berdasarkan definisi ini, dapat disinyalir bahwa adanya suatu kekuatan yang dibangun dengan nasionalisme untuk melakukan interaksi-interaksi internasional.

Dalam perkembangannya, nasionalisme sudah sejak lama hadir ditengah-tengah masyarakat internasional yang ditunjukkan melalui sikap pembelaan atas hak-hak bangsa maupun eksistensi suatu negara dimata dunia melalui unit-unit negara yang berkaitan dengan politik. Sikap terikat dengan negara atau berdasarkan perasaan untuk menunjukkan keterkaitannya memiliki arti bahwa perasaan tersebut subjektif instrument yang dimiliki negara untuk mendapatkan preferensi atau sikap yang menunjukkan

penghayatan dari suatu negara (Huddy dan Khatib 2007, 65). Munculnya rasa-rasa seperti ini disinyalir memberikan pengaruh pada kedaulatan dan keamanan suatu negara Di Indonesia, nasionalisme menjadi pengkokoh bangsa. Kini, terdapat kecemasan akan nasionalisme yang menghadapi berbagai persoalan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di perbatasanIndonesia.

Nasionalisme masyarakat perbatasan mulai menjadi permasalahan akibat aktivitas mereka yang bergantung pada negara Malaysia, misalnya bidang ekonomi dalam perdagangan, bidang pendidikan dan kesehatan yang berkaitan dengan kebutuhan hidup masyarakat. Masih belum lengkapnya jasa dan akses yang berhubungan dengan pendidikan dan kesehatan, di daerah perbatasan, sehingga masyarakat perbatasan menyeberang ke Malaysia untuk mendapat pelayanan lebih baik ke negara tetangga.

Lebih lanjut permasalahan muncul apabila anak-anak

yang mencari ilmu ke negara tetangga dipengaruhi pola pikirnya, terlebih masyarakat perbatasan disinyalir terbiasa bergantung dalam pemenuhan kebutuhan pokok pada Malaysia. Maka, dalam membentuk rasa Nasionalisme diindikasikan sangat sulit dibentuk apabila mereka tidak mendapatkan pola kehidupan yang layak. Tersudutnya kesejahteraan masyarakat perbatasan, disamping membentuk ketergantungan kepada Malaysia juga menumbuhkan rasa kepedulian mereka terhadap Malaysia dan berpeluang mengalihkan perhatian mereka untuk Malaysia.

Secara spesifik, nasionalisme dapat menimbulkan dampak ataupun pengaruh terhadap negara yang dibuktikan dengan adanya kontrol asing. Terdapat situasi dimana nasionalisme rakyat dan bangsa Indonesia akan pudar, jika di hadapkan dengan beberapa faktor terutama di bidang perekonomian. Tidak sedikit rakyat Indonesia yang menjadi penjaga keamanan di negara Malaysia. Melihat adanya hal tersebut maka Nasionalisme masyarakat perbatasan dianggap perlu

dipertanyakan.

Dapat ditekankan bahwa, di kondisi ini terdapat permasalahan bahwa masyarakat perbatasan Indonesia berhadapan dengan berbagai persoalan yang berat, karena timbulnya berbagai permasalahan yang ada, Nasionalisme yang berbentuk gangguan, adalah berupa nasionalisme yang tidak sehat, nasionalisme yang telah pudar, dan sebagainya.

Selain itu, ditemukan pula bahwa masyarakat di perbatasan ingin memiliki kartu identitas kenegaraan selain Indonesia (Pontianak.tribunnews.com 2017).

Dengan demikian, adanya perilaku tersebut diindikasikan akan memudahkan identitas nasionalisme pada masyarakat perbatasan Sajingan Besar. Berdasarkan pra penelitian yang dilakukan peneliti, terlihat masih belum tertatanya kondisi kehidupan masyarakat perbatasan karena mereka tidak mendapatkan perhatian yang khusus dari pemerintah terhadap kondisinya membuat masyarakat perbatasan merasa ketergantungan dengan negara Malaysia yang mereka anggap bisa mencukupi kebutuhannya. Berdasarkan fenomena dan

data tersebut maka peneliti merumuskan permasalahan penelitian yaitu bagaimana kondisi nasionalisme di perbatasan Kalimantan Barat, khususnya di wilayah Kabupaten Sambas Sajingan Besar.

Dalam menganalisa kondisi nasionalisme di perbatasan Kalimantan Barat, khususnya di wilayah Kabupaten Sambas Sajingan Besar, peneliti menggunakan pendapat Greenfeld (1992:30). Dengan merujuk pada indikator nasionalisme yaitu: (1). Identitas nasional, (2). Peran pemerintah dalam meningkatkan Kesadaran nasional; (Greenfeld 1992, 3).

### **Metode**

Untuk menganalisa bagaimana kondisi nasionalisme di perbatasan Kalimantan Barat Sambas Sajingan Besar berdasarkan identitas masyarakat dan pembangunan serta nasionalisme, peneliti menerapkan metode kualitatif yang dianalisa secara deskriptif melalui pengamatan langsung dan wawancara dengan narasumber kunci yakni Camat Sajingan Besar dan tokoh masyarakat perbatasan Sajingan Besar untuk menganalisa

kondisi nasionalisme.

### **Pembahasan**

#### **1. Identitas Nasional Masyarakat Perbatasan Sajingan Besar**

Kesadaran nasional individu atau kelompok masyarakat khususnya yang berdomisili di perbatasan Indonesia Malaysia menggambarkan identitas nasional masyarakat perbatasan Indonesia. Gambaran mengenai kebiasaan masyarakat perbatasan yang menyadari identitas diri sebagai warga negara Indonesia dan posisi mereka yang berada di perbatasan menjadi dilema bagi masyarakat perbatasan telah menimbulkan perilaku konsumsi produk Malaysia yang lebih tinggi dibanding produk dalam negeri dengan kata lain dapat menyebabkan ketergantungan dengan Malaysia. Untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan tidak asing lagi untuk menggunakan mata uang ringgit.

Apakah hal tersebut gambaran kondisi nasionalisme di perbatasan Kalimantan Barat khususnya Sajingan Besar bahwa nasionalismenya lemah?, meskipun belum diindikasikan sebagai suatu kepastian namun kondisi ini disinyalir mengancam nasionalisme masyarakat perbatasan yang akan cenderung terhadap negara Malaysia

sehingga pada akhirnya menggadaikan identitas mereka agar mendapatkan kesejahteraan maupun kemudahan dalam akses dan pemenuhan kebutuhan hidup yang lebih modern dan menghabiskan biaya lebih murah. Pada permasalahan ini, masyarakat Indonesia juga menjadi tenaga kerja di negara Malaysia dengan alasan seperti nilai tukar upah yang lebih tinggi, hingga kemudahan mendapatkan pekerjaan. Selain dari segi pemenuhan kebutuhan hidup, penggunaan bahasa juga mempengaruhi kondisi nasionalisme semakin lemah. Semakin sering interaksi namun masyarakat perbatasan Sajingan tidak dibekali edukasi, informasi dan rasa bangga akan pentingnya menjaga kebudayaan lokal, maka dominasi bahasa akan mempengaruhi masyarakat. Tidak sedikit pula, masyarakat yang berpikiran realistis namun tetap nasionalis dengan selalu menjunjung tinggi kesadarannya sebagai warga negara Indonesia. Nasionalisme yang dimaksudkan oleh masyarakat pada golongan ini adalah tetap menanamkan jiwa cinta tanah air dan memberikan kesetiaan kepada negara menjadi warga Indonesia walaupun berada dimanapun.

Ideologi nasional masyarakat

perbatasan Sajingan Besar. Warga negara Indonesia tentunya menganut Pancasila sebagai Ideologi nasional, namun hal ini terancam oleh kedua penjelasan sebelumnya dalam suatu definisi mengenai nasionalisme yakni menyangkut kesadaran dan identitas masyarakatnya. Jika kedua hal tersebut lemah, maka dengan seiringnya waktu ideologi juga akan terkikis oleh pengaruh asing, untuk itulah penguatan-penguatan nasionalisme terus ditekankan pada masyarakat perbatasan baik dalam peringatan hari nasional, pendidikan dan kehidupan sehari-hari. Berhubungan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia (RI), masyarakat bersemangat dalam memeriahkan HUT RI. Hal yang serupa juga terjadi pada saat berlangsungnya perlombaan seni oleh semua bagian masyarakat. Suka cita dengan menjadikan momen perayaan HUT RI dalam mengikat rasa kekeluargaan dan jiwa nasionalisme yang setiap tahun bisa didapatkan.

Disamping itu, HUT Kemerdekaan RI sebagai wadah untuk memperkokoh rasa kebangsaan pada keadaan tingkat pengharapan terhadap negara Malaysia. Rasa kesamaan yang menjadi masyarakat keterbelakangan di Indonesia, menjadi perkokohan secara

sendiri dalam menjalankan semua tantangan yang saat ini telah melekat pada kehidupan mereka. Walaupun tidak jarang dijalankan secara tidak adil oleh pemimpin bangsa ini. Di antaranya adalah fasilitas yang terbatas dan tidak juga dapat diberdayakan kualitas, sedangkan melancarkan bidang perekonomian yang mendotong tingkat ketentraman, tetapi mereka memperlihatkan rasa nasionalisme dengan cara mereka sendiri dengan diadakannya HUT Kemerdekaan RI.

Kedua negara Indonesia dan Malaysia saling ketergantungan, misalnya negara Malaysia memerlukan tenaga kerja untuk mengelola tenaga kerja dalam sektor pertanian dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Warga yang lebih dominan membeli produk Malaysia dibanding produk lokal, masyarakat ini memilih untuk mengharap negara Malaysia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Di sisi lainnya dengan menjadi warga negara Indonesia, yang tinggal diperbatasan mereka diwajibkan untuk memperkuat rasa nasionalisme, di aspek lainnya tetap dilaksanakan pemantauan pada situasi kondisi keterbelakangan di aspek politik, ekonomi dan budaya.

Masyarakat di perbatasan cenderung menggunakan mata uang ringgit dalam proses transaksi pasar, dan hal ini sudah menjadi kebiasaan pasar dan menjadikan ringgit selalu eksis dan tetap berlanjut dikarenakan interaksi pasar masyarakat perbatasan meluas ke ranah pasar internasional antara Indonesia dan Malaysia. Disamping itu, alasan utama dalam penggunaan ringgit adalah nilai ringgit lebih tinggi jika dibandingkan dengan Indonesia.

Dalam membangun nasionalisme, negara melibatkan berbagai aktor untuk membangun Identitas Nasional yang bersifat koheren demi kepentingan negara atau kepentingan lain yang saling bersaing (Smith 1991, 95-96). Identitas yang dimaksud yakni Identitas nasional masyarakat perbatasan Sajian Besar yang ditunjukkan melalui perilaku masyarakat perbatasan seperti penggunaan produk Malaysia yang mendominasi, penggunaan bahasa Malaysia hingga penggunaan mata uang ringgit yang sering dilakukan dapat memberikan efek lemahnya identitas nasional masyarakat perbatasan Sajian Besar Indonesia karena pudarnya budaya-budaya lokal/nasional dan produk dalam

negeri.

Masyarakat mempunyai pemikiran yang sejalan mengenai negara Malaysia. Berhubungan dengan keikutsertaan di bidang politik, masyarakat umumnya mempunyai keinginan dalam ikut aktif untuk berpartisipasi dalam semua aktivitas politik misalnya kampanye, perundingan politik, pemilu dan pilkada. Terlaksananya hal tersebut dilandasi dengan adanya bentuk kepedulian terhadap langkah-langkah politik untuk kehidupan bangsa yang akan datang. Walaupun yang kita pahami pemegang kekuasaan di bidang politik yang diketahui hanya memberikan janji tanpa gerakan dan aksi dalam melaksanakan perbaikan terutama dalam kampanye pemilu maupun pilkada.

Dari seluruh masyarakat yang menggantungkan kebutuhan pada negara Malaysia dan menjadikan peluang mencari rezeki, disamping itu masih ada sedikit dari sekumpulan masyarakat perbatasan yang tidak tertarik dalam menggantungkan hidupnya kepada Malaysia. Hal ini disebabkan oleh faktor eksternal karena pengalaman dan wawasan mereka kurang mendalam dalam berhubungan dengan warga negara Malaysia. Dan

menjadikan peluang mereka untuk menjalankan aksi sebagaimana masyarakat perbatasan lainnya sangat sedikit.

## **2. Peran pemerintah dalam meningkatkan Kesadaran nasional**

Nasionalisme dicapai apabila adanya keselarasan antara keinginan pemerintah dengan masyarakat di perbatasan Sajingan Besar yang dalam hal ini merujuk pada kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dapat tercipta apabila pembangunan daerah dilandasi oleh kekompakan, kesetaraan untuk memajukan pendidikan yang tanpa memihak berdasarkan harapan bangsa karena hal ini merupakan bagian dari pembangunan nasional. Sesuai dengan pernyataan tersebut, maka telah menjadi tugas pemerintah untuk mewujudkan bangsa yang terhindar dari keterbelakangan dan kemiskinan.

Apabila ditinjau berdasarkan penelitian di lapangan di Kecamatan Sajingan Besar, peran pemerintah dinilai masih belum dapat mengembangkan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana pengakuan dari salah tokoh masyarakat yang mengatakan “Pemerintah pusat masih belum serius memperhatikan kondisi kami di perbatasan, sehingga kami

banyak melakukan transaksi dan informasi dari negara tetangga". Selain itu, ini dapat memunculkan perspektif yang berkenaan dengan cerminan bangsa, dimana tampilan perbatasan yang tidak ditata secara baik akan menunjukkan wajah Indonesia di mata bangsa lain.

Sebagian besar, warga Kecamatan Sajingan Besar bermata pencarian sebagai petani dan tukang pikul dengan upaya memperoleh penghasilan tambahan demi mencukupi aktivitas kesehariannya, misalnya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak dan sebagainya. Minimnya perhatian pemerintah kepada masyarakat di kawasan perbatasan Kecamatan Sajingan Besar membuat masyarakat semakin tergantung dengan masyarakat perbatasan Malaysia.

Situasi ini mengakibatkan kedekatan ke-dua negara semakin erat, sehingga masyarakat yang tinggal di wilayah sekitar Kecamatan Sajingan Besar melakukan aktivitas perdagangan ilegal misalnya penjualan kayu, ikan bahkan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal yang semakin marak dan membuat kondisi yang tidak nyaman antara Negara Indonesia dan Negara Malaysia. Buruknya keadaan tersebut

membuat kedua pihak terkait, yakni antara negara Malaysia dan negara Indonesia membuat kesepakatan dalam membentuk Sosial Ekonomi (Sosek) Malaysia Indonesia (Malindo) yang menjadi media untuk membentuk wilayah masing-masing negara. Saat pertemuan tersebut dibahaslah permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan pembangunan perbatasan, perekonomian, penanggulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), dan berbagai bentuk aktivitas penggelapan lainnya yang dapat menghancurkan hubungan negara-negara tersebut.

Berdasarkan aspek politik, kondisi tersebut dapat memberikan dampak negatif terhadap bangsa Indonesia. Ini dibuktikan dengan terdapatnya kasus terkait tenaga kerja ilegal dan tindakan perlakuan tidak manusiawi terhadap beberapa pekerja.

Tentunya, Pemerintah Indonesia berupaya menanggulangi permasalahan tersebut dengan memberikan pembelaan atas hak-hak warga negaranya yang tinggal di Malaysia. Kerja sama kedua Negara sebagaimana yang diungkapkan oleh Pimpinan Proyek (Pimpro) perbatasan pembangunan akan berkesinambungan secara terus-menerus mendiskusikan

harapan, tidak hanya sekedar dijadikan lambang saja sebagaimana yang kemukakan oleh tim Sosial Ekonomi (Sosek) Malaysia Indonesia (Malindo) berdasarkan standar mutu saranadanprasarana yang didirikan diperbatasan juga mejadi titik fokus. Sebagaimana di Kecamatan Sajingan Besar sarana dan prasarana umum saat ini semakin diperbaiki sedikit demi sedikit, hasil dari observasi penulis menilai bahwa kini fasilitas pendukung dianggap cukup layak apabila di bandingkan sebelum pembangunan wilayah SajinganBesar.

Di samping itu hal yang menjadi penghambat dalam pembangunan perbatasan adalah Keputusan Presiden (Kepres) yang menetapkan pembangunan di wilayah perbatasan. Selain itu, permasalahan tersebut juga terletak pada anggaran yang diberikan kepada Pemerintah pusat dalam membangun wilayah perbatasan. Pemerintah pusat memiliki tanggung jawab untuk pembangunan di wilayah perbatasan karena gerbang masuk dua negara terdapat di kawasan tersebut. Semua juru bicara terkait pembangunan di kawasan perbatasan yang menyertakan berbagai instansi yang sadar akan tanggung

jawab masing-masing.

Bilateral yang dilakukan antara negara Malaysia dan negara Indonesia untuk merundingkan masalah politik yang terdapat di kawasan perbatasan. Kegiatan ilegal tersebut dibahas dalam pertemuan Sosial Ekonomi (Sosek) Malaysia Indonesia (Malindo) terlebih karena wilayah perbatasan merupakan wilayah keluar masuknya hal yang berjenis ilegal misalnya bahan sembako, kayu, dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) akan mengorbankan dirinya ke Malaysia. Sedangkan pemerintah Indonesia merasa terpuruk dengan kondisi tersebut.

Perbatasan adalah lokasi yang perlu mendapatkan perhatian khusus karena wilayah perbatasan memiliki potensi yang besar bagi kemajuan negara Indonesia. Dalam memajukan Indonesia, peran politik Negara Indonesia tidak luput juga ikut terkait. Perjuangan untuk memajuka Indonesia secara setengah-setengah hanya akan menjadikan masyarakat perbatasan merasa semakin sulit, contohnya usaha pekayuan.

Mereka menyakini bahwa hutan adalah kepunyaan mereka dan mereka merasa memiliki bagian untuk meramu kayu hasil hutan. Di samping

itu pembiayaan proses penebangan juga di biayai oleh Negara Malaysia. Orang-orang yang datang dengan mudah ke wilayah Indonesia membuat kegiatan ilegal merajalela. Di bidang ekonomi kerusakan hutan menyebabkan kerugian yang sangat tinggi. Di samping itu masyarakat yang tinggal di perbatasan merasa untung karena proses dan hasil penjualan kayu sudah pasti dibeli oleh Negara Malaysia. Hasil hutan Indonesia khususnya di kawasan perbatasan banyak dinikmati oleh negara Malaysia, karena pemantauan dan aturan hukum yang menanganinya tidak tegas. Disamping itu ada indikasi di perbatasan (tapal batas) ada yang tidak sesuai dengan letak asalnya.

Keharmonisan antar negara harus selalu dipantau berdasarkan tindakan beberapa kumpulan manusia yang tidak lari dari tanggung jawabnya sehingga menimbulkan simbiosis parasitisme. Terkait dengan situasi ini wilayah perbatasan bagaikan dikaitkan dengan hukum di Indonesia yang tidak tegas dalam menetapkan struktur organisasi maupun desa sehingga berperan sebagai masukan untuk pemerintah dalam mengevaluasi keadaan yang ada. Misalnya dari Lembaga Lembaga Ketahanan

Masyarakat Desa (LKMD), organisasi kepemudaan seperti Karang Taruna, Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) yang terfokus pada pengembangan masyarakat.

Maka dari itu, pemerintah akan terbantu dalam menjalankan pembangunan di wilayah perbatasan yang menggabungkan berbagai organisasi. Kecamatan Sajingan Besar berbatasan dengan langsung wilayah Biawak-Lundu (Sarawak) dengan menggunakan media kemasyarakatan di lingkungan masyarakat dalam memperkokoh integritas kawasan perbatasan Organisasi kemasyarakatan harus di tunjau dan direalisasikan dalam melancarkan rencana pemerintah untuk pembangunan wilayah perbatasan.

Saat ini pemahaman politik terhadap masyarakat sebagaimana yang dikemukakan oleh Camat Sajingan Besar semakin ditingkatkan, karena pada saat ini demokrasi membutuhkan sumber daya yang memiliki kecerdasan untuk mendorong rencana pembangunan yang dilaksanakan.

Diyakini bahwa pembangunan atas wilayah perbatasan, terutama di lokasi Kecamatan Sajingan Besar akan meningkatkan peluang kerja untuk masyarakat sekitarnya. Hal

ini berkenaan dengan permasalahan minimnya ketersediaan lapangan pekerjaan, yang mana kondisi tersebut dinilai memengaruhi persepsi tingkat perekonomian di wilayah perbatasan.

### Kesimpulan

perbatasan Sajingan Besar tetap realistis dengan bergantung pada Malaysia untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari ditunjukkan dengan dominannya pembelian produk Malaysia hingga penggunaan mata uang ringgit yang disinyalir melemahkan identitas nasional masyarakat perbatasan Sajingan Besar sebagai masyarakat Indonesia.

Tentunya peran Pemerintah dalam meningkatkan kesadaran nasional, menentukan kebijakan, maupun memperhatikan kondisi lingkungan di perbatasan Sajingan Besar sangat diperlukan. Ini dibuktikan dengan minimnya suprastruktur dan infrastruktur yang menjadi faktor penghambat pada pembangunan Kawasan Perbatasan Sajingan Besar Kabupaten Sambas, sehingga menyebabkan masyarakat perbatasan Sajingan Besar lebih bertindak realistik dengan mempertimbangkan untung dan rugi jika tetap bergantung pada wilayah perkotaan dengan jarak tempuh

Identitas Masyarakat perbatasan Sajingan Besar digambarkan kondisi nasionalisme diperbatasan Kalimantan Barat khususnya Sajingan Besar berdasarkan kesadaran masyarakat mengenai identitas sebagai warga negara Indonesia membuat masyarakat maupun akses yang sulit dari pada bergantung dengan Malaysia yang jaraknya cukup dekat.

### Daftar Referensi

- Gellner, E. *Nations and nationalism*. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1983 (diakses 20 Maret 2018).
- Greenfeld, L. *Nationalism : Fiveroads to modernity*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1992 (diakses 20 Maret 2018).
- Huddy, L, and N Khatib. "American patriotism, national identity, and political involvement." (American Journal of Political Science) 51: 63–77. Melalui [http://terpconnect.umd.edu/~smilex3/socy401/Huddy-American\\_Patriotism-National\\_Identity-and\\_Political\\_Involvement.pdf](http://terpconnect.umd.edu/~smilex3/socy401/Huddy-American_Patriotism-National_Identity-and_Political_Involvement.pdf) (diakses 20 Maret 2018).
- Pontianak.tribunnews.com. *Masyarakat*

*Perbatasan  
Berkewarganegaraan ganda ini  
desakan anggota DPRD Kalbar.*  
September 20, 2017. Melalui  
<http://pontianak.tribunnews.com/2017/09/20/masyarakat-perbatasan-berkewarganegaraan-ganda-ini-desakan-anggota-dprd-kalbar>  
(diakses 20 Maret 2018).

Smith, A. "National Identity." *Reno: University of Nevada Press.international relations: Norms, foreign policy, and enmity*" (Spinger), 1991  
(diakses 20 Maret 2018).

Zhao, S. "Chinese Nationalism and Its International Orientations."  
(Political Science Quarterly)  
115 (2000): 1-33. Melalui  
[https://www.researchgate.net/publication/233595664\\_Chinese\\_Nationalism\\_and\\_Its\\_International\\_Orientations](https://www.researchgate.net/publication/233595664_Chinese_Nationalism_and_Its_International_Orientations) (diakses 20 Maret 2018).